

DAFTAR BACAAN

A. BUKU

- Agusmidah, *Dinamika dan Kajian Teori Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010.
- Alim, Muhammad, *Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Madinah dan UUD 1945*, Yogyakarta, UII Press, 2001.
- Azhary, Muhammad Tahir, *Negara Hukum: Suatu Study tentang prinsip-prinsipnya dilihat dari segi Hukum Islam, implementasinya pada periode Negara Madinah Masa Kini*, Kencana Media Group, Jakarta, 2007.
- Bambang, R. Joni, *Hukum Ketenagakerjaan*, Pustaka Setia Bandung, 2013.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Cetakan keempat, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1972.
- Budiman, Iskandar, *Dilema Buruh di Rantau (Membongkar Sistem Kerja TKI di Malaysia)*, Ar-Ruzz, Yogyakarta, 2004.
- Djamali, R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003.
- Djumadi, *Hukum Perjanjian Kerja*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- Effendi, A.Masyhur, *Hak Asasi Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Jakarta, PT.Ghalia Indonesia. 1993.
- Hadjon, Philipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Husni, Lalu, *Hukum Penempatan dan Perlindungan TKI*, Malang, Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2010.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Jakarta, Balai Pustaka, Cetakan Keempat.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cet. 6, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Solo, 2003.
- Parson dalam Muslan Abdurrahman, *Ketidakpatuhan TKI Sebuah Efek Diskriminasi Hukum*, Univ. Muhammadiyah Malang Press, 2006.
- Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Alumni, Bandung, 1986.
- Rahardjo, Satjipto, *Pendayagunaan Sosiologi Hukum untuk Memahami Proses-proses dalam Konteks Pembangunan dan Globalisasi*, Jurnal Hukum, No. 7 Vol. 4 tahun 1997.
- Rahardjo, Satjipto, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, 2003.

- Setiono, *Rule of Law (supremasi hukum)*. Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.
- Simanjutak, Payaman, *Aplikasi Konvensi Dasar ILO*, Himpunan Sumber daya Manusia Indonesia, Jakarta, 2000.
- Simanjutak, Payaman, dalam Senjun H Manuhulung, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, PT.Rineka Citra, Jakarta, 1998.
- Soepiadhy, Soetanto, *Meredesain Konstitusi*, Burungmerak Press, Jakarta, 2008.
- Soepomo, Imam, *Hukum Perburuhan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan*, Jambatan, Jakarta, 1997.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Pres, Jakarta, 1986.
- Sudono, Agus, *Perburuhan Dari Masa Ke Masa*, PT.Pustaka Cidesindo, Jakarta, 1997.
- Wawa, Jannes Eudes, *Ironi Pahlawan Devisa*, Jakarta, 2005.
- Yudhanti, Ristina, *Perempuan dalam Pusaran Hukum*, Thafa Media, 2014.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Penghapusan Kerja Paksa.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 24 Tahun 2014 Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Per.10/Men/V/2009 tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan Dan Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Tata Cara Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia Dari Negara Penempatan Ke Daerah Asal Secara Mandiri.
- Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Jabatan Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Untuk Pekerjaan Domestik.
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja

- Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penerbitan Surat Izin Pengerahan
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Tanggap Darurat Bagi Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Izin Usaha Jasa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Di Dalam Negeri Dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Badan Koordinasi Penanaman Modal
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Elektronik Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri Kepada Tenaga Kerja Indonesia
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tarif Pemeriksaan Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia.
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Kampung Tenaga Kerja Indonesia/Sentra Usaha Tenaga Kerja Indonesia Purna.
- Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Optimalisasi Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.
- Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian Dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Pada Pengguna Perseorangan Di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah.
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penundaan Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia Purna/Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah/Warga Negara Indonesia Overstayers Dan Keluarganya
- Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 354 Tahun 2015 tentang Jabatan Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Pada Pengguna Perseorangan.
- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 42 Tahun 2015 tentang Tata Cara

Pemberian, Perpanjangan Dan Pencabutan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 41 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Sarana Dan Prasarana Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 45 Tahun 2015 tentang Pembiayaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*)
International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families (Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya)

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 104 A/MEN/2002.

Konvenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik

Konvensi (*Internasional Labour Organization/ILO*)

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the elimination of all forms of discrimination against women / CEDAW*)

C. Majalah dan Jurnal

Satjipto Raharjo, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*, Jurnal Masalah Hukum, 1993.

Tanti Kirana Utami, Perlindungan TKI dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, Makalah.

Veronica Adelin, Peran Perempuan dan Paradigma Pembagian Kerja dalam Keluarga, Makalah.

D. Website

Aristoteles dalam <http://tesishukum.com?pengertian-negara-hukum-menurut-ahli/>, diakses pada tanggal 24 Juni 2016, pukul 19.02 wib.

https://id.wikipedia.org/wiki/Tenaga_Kerja_Indonesia , diakses pada tanggal 09 Mei 2016, pukul 21.45 wib

www.bnp2tki.go.id, diakses pada tanggal 17 Juli 2016, pukul 11.00 wib.

www.bnp2tki.com, diakses pada tanggal 06 Agustus 2016, pukul 18.45 wib

www.bps.com, diakses pada tanggal 06 Agustus 2016, pukul 18.03 wib.

<http://sp.beritasatu.com/home/sekitar-1502-juta-tki-mengalami-pelanggaran-ham/102378>, diakses pada tanggal 07 Agustus 2016, pukul 20.06 wib.